

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo telah memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh, terutama dalam aspek pemugaran. Melalui program ini, berbagai infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan dan drainase, telah mengalami perbaikan yang signifikan. Peningkatan jalan lingkungan dengan metode pengecoran dan pemasangan paving telah memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal mobilitas, kelancaran aktivitas ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, sistem drainase yang telah diperbaiki turut membantu mengurangi genangan air yang sering terjadi di kawasan tersebut. Namun, meskipun upaya pemugaran telah berjalan dengan cukup baik, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan, seperti masih adanya beberapa ruas jalan yang belum mendapatkan perbaikan serta permasalahan banjir rob yang belum sepenuhnya terselesaikan. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya berkelanjutan agar seluruh wilayah yang membutuhkan intervensi dapat memperoleh manfaat secara merata.

Peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program KOTAKU dalam aspek peremajaan masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat peningkatan kualitas permukiman kumuh. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih terbatas akibat keterbatasan lahan, sementara pemanfaatan RTH yang sudah ada belum optimal. Fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) umum yang telah dibangun

juga mulai berkurang penggunaannya karena semakin banyak rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri. Namun, di beberapa wilayah tertentu, masih ada warga yang belum memiliki akses sanitasi layak, sehingga limbah domestik masih dibuang langsung ke lingkungan dan mencemari air laut serta sungai. Selain itu, akses terhadap air bersih juga belum merata, menyebabkan sebagian warga harus mengandalkan sumber air yang kualitasnya belum terjamin. Pengamanan kebakaran di permukiman juga masih kurang memadai, ditandai dengan keterbatasan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) serta minimnya sosialisasi terkait penggunaannya.

Peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program KOTAKU dilihat dari aspek pemukiman kembali di Kelurahan Bandarharjo belum menunjukkan hasil yang optimal dalam mengatasi kepadatan penduduk di kawasan permukiman kumuh. Hingga saat ini, belum ada skema pemukiman kembali yang dilaksanakan secara efektif untuk memberikan solusi bagi warga yang tinggal di daerah rawan bencana, seperti bantaran sungai dan pesisir pantai. Sebagian besar warga masih bertahan di lokasi yang sama karena belum tersedianya alternatif hunian yang layak, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemukiman kembali belum menjadi prioritas utama dalam implementasi Program KOTAKU di wilayah ini. Dalam melaksanakan pemukiman kembali, program ini lebih terfokus pada peningkatan kualitas permukiman melalui pendekatan skala lingkungan, khususnya dengan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, seperti jalan lingkungan, saluran drainase, penyediaan air bersih,

pengelolaan sampah, dan sanitasi. Program ini tidak mencakup pembangunan rumah susun, meskipun rumah susun telah lama ada di kawasan tersebut.

Dalam implementasinya, peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo didukung oleh berbagai faktor yang memastikan efektivitas pelaksanaannya. Salah satu faktor pendukung utama adalah adanya regulasi dan kebijakan strategis dari pemerintah yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan program ini. Selain itu, alokasi anggaran dari APBN turut berperan penting dalam mendanai pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keberhasilan program ini juga tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), serta pemangku kepentingan lainnya, yang berperan dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program melalui mekanisme perencanaan dan pengawasan yang ketat. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan gotong royong dan pembangunan infrastruktur juga menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan program ini. Sosialisasi yang efektif melalui berbagai media komunikasi, seperti pertemuan langsung, media sosial, serta kelompok komunikasi masyarakat, turut berperan dalam meningkatkan pemahaman serta keterlibatan warga dalam program ini.

Peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo juga menghadapi berbagai hambatan yang berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah aspek finansial, terutama ketika terjadi refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021, yang menyebabkan keterlambatan serta pengurangan

cakupan program. Selain itu, keterbatasan tenaga kerja dan keterlambatan pasokan material juga menjadi faktor yang sering menghambat penyelesaian proyek, terutama dalam pembangunan infrastruktur fisik. Faktor eksternal, seperti kondisi cuaca yang tidak menentu, terutama hujan deras, juga sering kali memperlambat proses konstruksi dan menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Selain itu, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga infrastruktur yang telah diperbaiki juga menjadi tantangan tersendiri. Masih adanya kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama ke saluran drainase, menyebabkan permasalahan yang berulang, seperti penyumbatan dan banjir. Faktor lainnya adalah kendala legalitas lahan di wilayah tertentu, seperti RW 09 hingga RW 11, yang berada di atas lahan milik PT KAI dan PT Pelindo. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam pelaksanaan program, karena masyarakat di wilayah tersebut belum dapat menerima manfaat dari program secara optimal.

Secara keseluruhan, Program KOTAKU di Kelurahan Bandarharjo telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan kualitas permukiman kumuh, terutama dalam aspek pemugaran. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi dalam aspek peremajaan dan pemukiman kembali agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam pengelolaan program ini, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan anggaran yang lebih fleksibel, serta penyelesaian kendala legalitas lahan. Dengan adanya upaya yang lebih terstruktur dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat,

serta pemangku kepentingan lainnya, diharapkan Program KOTAKU dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat Kelurahan Bandarharjo dalam jangka panjang.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Banyak infrastruktur dasar seperti jalan, saluran drainase, dan penyediaan air bersih yang belum tersentuh perbaikan, sehingga perlu dilakukan identifikasi area yang belum mendapatkan perbaikan dan melibatkan masyarakat dalam perencanaannya.
2. Kualitas air bersih masih rendah dan ketergantungan pada air tanah tinggi, sehingga perlu diperluas jaringan perpipaan dan bekerja sama dengan PDAM serta penyedia air lainnya untuk meningkatkan distribusi air bersih.
3. Sistem pengelolaan sampah belum optimal, dengan jadwal pengangkutan yang kurang efektif dan minimnya TPS, sehingga perlu dilakukan optimalisasi jadwal pengangkutan, penambahan TPS, serta pembentukan bank sampah berbasis komunitas untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan memberikan nilai ekonomi bagi warga.
4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih minim dan kurang dimanfaatkan, sehingga perlu identifikasi lahan kosong yang potensial serta kolaborasi dengan sektor swasta melalui program CSR untuk pengadaan dan pengelolaan RTH.

5. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih rendah, sehingga perlu edukasi berkelanjutan melalui pelatihan, kampanye kebersihan, serta pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan dan infrastruktur.
6. Risiko kebakaran di permukiman padat masih tinggi akibat kurangnya alat pemadam, sehingga perlu pendistribusian APAR ke wilayah RW/RT serta pelatihan kesiapsiagaan kebakaran bagi warga.
7. Skema pemukiman kembali dengan merenovasi bangunan rumah susun yang sudah ada agar lebih layak huni, sekaligus menyediakan hunian alternatif yang terjangkau bagi warga terdampak relokasi.
8. Legalitas lahan masih menjadi kendala dalam relokasi warga, sehingga perlu koordinasi yang lebih intensif dengan pemilik lahan seperti PT KAI dan PT Pelindo untuk mencari solusi terbaik bagi warga terdampak.
9. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta masih lemah, sehingga perlu peningkatan koordinasi antar instansi serta dorongan bagi sektor swasta untuk berperan lebih aktif dalam penyediaan infrastruktur melalui program CSR.
10. Keterbatasan anggaran dan sumber daya sering menghambat pelaksanaan program, sehingga perlu penyusunan perencanaan anggaran yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi darurat serta mencari sumber pendanaan alternatif seperti hibah internasional atau bantuan dari pemerintah pusat.